

PELAYANAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN PADA MASYARAKAT MINORITAS DI KABUPATEN TAPANULI UTARA, SUMATERA UTARA

HUSEN HASAN BASRI

This article depicts the implementation of religious educational service in minority society—involving the form and kinds of religious educational service given by minority society, the obstacles of its establishment and also its expectation to religious education in minority society. By taking a case in Tarutung, it is found that religious educational service in the region is depended on how far the creativity of moslem minority in managing the religious-educational service for themselves. In Tarutung, the religious education service is organized by the Association of Moslem Tarutung. Through this organization, the moslem minority of Tarutung carrying out the religious educational service such as reading Al-Qur'an, writing Al Qur'an, and learning Shalat for fulfilling their community's needs.

I. Pendahuluan

UUD 1945 mengamanatkan mengenai pentingnya pendidikan bagi seluruh warga seperti tertuang di dalam pasal 28 B ayat (1) bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan

budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia, dan pasal 31 ayat (1) bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Sesuai dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, salah satu misi pendidikan nasional adalah mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh

pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah disebutkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus urusan sendiri pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.¹ Dan salah satu urusan wajib Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan pendidikan. Kenyataan di lapangan, belum semua Pemda bisa memperlakukan dengan adil terhadap urusan pendidikan terutama pendidikan agama dan keagamaan. Bahkan disinyalir terjadi diskriminasi perlakuan terhadap pendidikan agama dan keagamaan, walaupun di beberapa Pemerintah Daerah di Indonesia telah muncul kesadaran baru dengan memperhatikan pendidikan agama dan keagamaan.

Perdebatan terakhir berkaitan dengan diskriminasi pendidikan keagamaan adalah diberlakukannya

Surat Edaran Mendagri Nomor: 903/2429/SJ tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun Anggaran 2006, tertanggal, 21 Setember 2005. Terdapat pernyataan yang memperkuat diskriminasi tersebut yakni pada lampiran II SE tersebut. Dikatakan bahwa “Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pengalokasian anggaran APBD yang diperuntukkan membantu institusi vertikal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di daerah tidak diperbolehkan”. Padahal, lembaga pendidikan keagamaan berhubungan secara vertikal dengan Departemen Agama.² Ini artinya Pemerintah Daerah tidak diperbolehkan mengalokasikan anggarannya untuk lembaga pendidikan keagamaan.

Bila ini benar diberlakukan, tentu saja sangat memprihatinkan, karena data yang ada menunjukkan hingga tahun 2002 masih menyisakan 11,3 persen penduduk Indonesia belum melek huruf yaitu pada rentangan usia 15– 24 tahun.³ Sedangkan dari sisi ekonomi, pen-

¹ Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Untuk urusan wajib Pemerintah daerah lihat pasal 13 dan 14.

² Ahmad Choirul Fata, *Anak Tiri itu Bernama Madrasah*, Republika, 13/2/2006. Ada statemen yang memperkuat Husni Rahim dalam tulisan Choirul Fata yaitu “Selama beberapa dekade pasca-kemerdekaan, lembaga pendidikan di bawah Depag mendapat jatah anggaran jauh di bawah anggaran yang diterima lembaga pendidikan yang dinaungi Diknas.

³ Data ini diambil dari Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium, tahun 2004.

duduk miskin, menurut sumber yang sama, hingga tahun 2003 masih berkisar 17,4 persen.⁴ Ini penting mengingat kemiskinan juga diprediksi sebagai penghambat laju pemerataan pendidikan. Dalam laporan ini dijelaskan bahwa penduduk yang masih buta huruf diperkirakan adalah mereka yang berada di daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh pelayanan pendidikan dan penyandang cacat.

Kenyataan lain yang bisa ditemukan di lapangan bahwa Indonesia merupakan sebuah negara multi etnis, multi bahasa, multi budaya dan multi agama. Dari sisi etnis terdapat kurang lebih 1000 etnis atau sub etnis tersebar di wilayah Indonesia ini.⁵ Dari sisi agama terdapat lima agama yang diakui negara sebagai agama resmi (dan masih banyak lagi agama-agama yang belum diakui negara), juga menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Demikian halnya dengan keanekaragaman bahasa dan budayanya. Keadaan ini harus disadari

menyimpan potensi besar timbulnya pertentangan satu sama lainnya. Hal lain yang juga harus dicermati adalah penyebaran secara kuantitatif antar etnis, bahasa, budaya dan agama juga tidak selaluimbang. Di sini yang kemudian memunculkan apa yang disebut mayoritas-minoritas. Penyebaran yang tidak selaluimbang tersebut mempunyai implikasi terhadap pemerataan pendidikan dimana belum seluruh rakyat Indonesia melek huruf.

Dalam konteks tersebut, tulisan ini akan menggambarkan sejauhmana implementasi pelayanan pendidikan keagamaan di lingkungan masyarakat minoritas, bentuk-bentuk pelayanan pendidikan keagamaan seperti apa yang diberikan kepada masyarakat minoritas, dan apa hambatan dalam penyelenggaraannya serta apa harapan masyarakat terhadap pendidikan keagamaan di lingkungan masyarakat minoritas.

⁴ Tentang jumlah penduduk miskin sebenarnya datanya selalu berubah. Kenyataan ini diakui oleh laporan Milenium bahwa perubahan bisa disebabkan adanya perubahan standar. Misalnya pada tahun 1996 garis kemiskinan yang ditetapkan, di daerah urban Rp. 38.246 dan daerah rural Rp. 27.413. Dengan standar ini jumlah orang miskin daerah urban 9,7 dan rural 12,3. Tapi bagitu standar dinaikkan pada tahun 1998 uantu daerah urban Rp. 42.032 dan rural Rp. 31.366, jumlah orang miskin menjadi, urban 13,6 dan rural 19,8

⁵M Ainul Yaqin, M.Ed, *Pendidikan Multi Kultural Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*, Pilar Media, Yogyakarta, 2005, hal. 206

Tulisan ini diangkat dari hasil penelitian tentang pelayanan pendidikan keagamaan di lingkungan masyarakat minoritas. Masyarakat minoritas dapat diartikan dua, yakni pertama, minoritas dalam konteks jumlah. Artinya, lingkungan masyarakat muslim yang secara kuantitas lebih kecil dibanding komunitas agama lain. Kedua, minoritas dalam arti ekonomi. Yaitu lingkungan masyarakat yang secara ekonomi tertinggal dibanding daerah lain sehingga mereka memiliki keterbatasan dalam memberikan pelayanan pendidikan keagamaan. Masyarakat minoritas dalam tulisan ini dimaksudkan untuk pengertian pertama yakni minoritas secara agama. Sebelum menggambarkan masalah-masalah tersebut, penulis akan menggambarkan terlebih dahulu lokasi penelitian kabupaten Tapanuli Utara sehingga menunjukkan arti minoritas secara kuantitas agama.

II. Deskripsi Kabupaten Tapanuli Utara

Tapanuli Utara adalah salah satu kabupaten di propinsi Sumatra Utara. Sumatra Utara berada di bagian barat Indonesia. Sebelah utara berbatasan dengan Propinsi

Daerah Istimewa Aceh, sebelah Timur dengan Negara Malaysia di Selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan Propinsi Riau dan Sumatra Barat dan di sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Berdasarkan kondisi letak dan kondisi alam, Sumatra Utara dibagi dalam 3 kelompok wilayah yaitu Pantai Barat, Dataran Tinggi dan Pantai Timur.

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2000 jumlah penduduk Sumatra Utara yang menganut agama Islam sebesar 65,45 %, Kristen Katolik sebesar 4,78 %, Kristen lainnya sebesar 26,62 %, Hindu sebesar 0,19 %, Budha sebesar 2,82 % dan agama lainnya sebesar 0,14 %. Jika jumlah penduduk Sumatra Utara sebesar 12.369.818 jiwa, maka jumlah penduduk Sumatra Utara berdasarkan agama adalah: Islam berjumlah 8.095.652 jiwa (65,45 %), Kristen berjumlah 3.292.687 jiwa (26,61 %), Katolik berjumlah 561.740 jiwa (4,79 %), Hindu berjumlah 22.929 jiwa (0,19 %), Budha berjumlah 349.228 jiwa (2,82 %), dan lain-lain berjumlah 17.582 jiwa (0,14 %). Jumlah sarana ibadah di propinsi Sumatra Utara yaitu 8.328 masjid, 1.721 musholla, 3.819 langgar, 13.812 gereja Kristen, 2.063 gereja

Katholik, 56 Kuil, dan 520 Vihara. Dari data tersebut, propinsi Sumatra Utara dilihat dari segi pemeluk agama, Islam bukan agama minoritas tetapi agama mayoritas. Namun di beberapa kabupaten, Islam merupakan agama minoritas.

Menurut Kabid Pendidikan Keagamaan Pondok Pesantren dan Penamas Kanwil Departemen Agama propinsi Sumatra Utara ada beberapa kabupaten di Sumatra Utara yang masyarakat muslimnya minoritas yaitu kabupaten Nias, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Dairi, dan Karo. Artinya minoritas muslim yang dimaksud di sini adalah tingkat kabupaten bukan tingkat propinsi. Penulis sebenarnya disarankan oleh pihak Kabid untuk melakukan penelitian di kabupaten Karo dengan alasan daerahnya cukup dekat dengan Kanwil Depag propinsi Sumatra Utara yang berjarak kira-kira 78 km dan tidak susah untuk mencari tempat tinggal. Penulis sempat menanyakan daerah Nias tetapi pihak Kabid menjawabnya bahwa untuk menuju daerah itu perlu waktu lama dan membutuhkan sehari semalam untuk sampai di tempat itu. Tidak lama kemudian penulis dengan pihak Kabid sepakat untuk memilih kabupaten Tapanuli

Utara sebagai lokasi penelitian. Penulis memilih kabupaten Tapanuli utara karena kabupaten ini jumlah masyarakat muslimnya minoritas. Di samping itu lembaga pendidikan yang berada di bawah Depag sangat kecil. Berikut ini profil kabupaten Tapanuli Utara yang menggambarkan bahwa daerah ini minoritas muslim.

Pada masa Hindia Belanda, kabupaten Tapanuli Utara termasuk kabupaten Dairi dan Toba Samosir—sekarang termasuk dalam keresidenan Tapanuli—yang dipimpin seorang Residen Bangsa Belanda yang berkedudukan di Sibolga. Keresidenan Tapanuli yang dulu disebut *Residentie Tapanuli* terdiri dari 4 *Afdeling* (kabupaten) yaitu Batak Landen, Padang Sidempuan, Sibolga dan Nias. Batak Landen dipimpin seorang Asisten Residen yang ibukotanya Tarutung yang terdiri 5 *Onder Afdeling* (wilayah) yaitu: wilayah Silindung ibukotanya Tarutung, wilayah Humbang ibukotanya Siborong-borong, wilayah Toba ibukotanya Balige, wilayah Samosir ibukotanya Pangururan, dan kabupaten Dairi sekarang ibukotanya Sidikalang. Pada waktu pendudukan tentara Jepang struktur pemerintahan di Tapanuli Utara hampir tidak berubah, hanya namanya yang

berubah seperti Asistent Resident diganti dengan nama *Gunseibu* dan menguasai seluruh tanah Batak dan disebut tanah Batak Sityotyoy.

Sesudah kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah mulai membentuk struktur pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Dengan diangkatnya Dr. Ferdinand Lumbantobing sebagai Residen Tapanuli, disusulah struktur pemerintahan dalam negeri di Tapanuli khususnya di Tapanuli Utara sebagai berikut: a) nama Afdeling Batak Landen diganti menjadi Luhak Tanah Batak dan sebagai luhak pertama diangkat Cornelis Sihombing. B) onder distrik diganti menjadi Urung kecil dan dipimpin Urung kecil dan dipimpin kepala Urung kecil yang disebut Asisten Demang. Selanjutnya terjadi perubahan, nama Luhak diganti menjadi kabupaten yang dipimpin Bupati, Urung menjadi wilayah yang dipimpin Demang, serta Urung kecil mejadi kecamatan yang dipimpin oleh Asisten Demang.

Pada tahun 1946 Kab. Tanah Batak terdiri dari 5 (lima) wilayah yaitu Silindung, Wilayah Humbang, Wilayah Toba, Wilayah Samosir dan Wilayah Dairi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Demang. Kecamatan-kecamatan tetap seperti yang ditinggalkan Jepang.

Setelah Belanda meninggalkan Indonesia pada pengesahan ke-aulatan, pada permulaan tahun 1950 di Tapanuli dibentuk kabupaten baru yaitu kabupaten Tapanuli Utara (dulu kabupaten Batak), kabupaten Tapanuli Selatan (dulu kabupaten Sibolga) dan kabupaten Nias (dulu kabupaten Nias). Dengan terbentuknya kabupaten ini, maka kabupaten yang dibentuk pada tahun 1947 dibubarkan. Disamping itu di tiap kabupaten dibentuk badan legislatif Dewan Perwakilan Rakyat. Pada tahun 1998 kabupaten Tapanuli Utara dimekarkan menjadi dua kabupaten yaitu kabupaten Tapanuli Utara dan kabupaten Toba Samosir. Kemudian pada tahun 2003 kabupaten Tapanuli Utara dimekarkan kembali menjadi dua kabupaten yaitu kabupaten Tapanuli Utara dan kabupaten Humbang Hasundutan

Secara geografi, kabupaten Tapanuli Utara merupakan salah satu dari 25 daerah kabupaten/kota di Sumatra Utara yang terletak di wilayah pengembangan dataran tinggi Sumatra Utara berada pada ketinggian antara 300-1500 meter di atas permukaan laut. Secara geografis letak kabupaten Tapanuli Utara diapit atau berbatasan langsung dengan lima kabupaten yaitu, di sebelah Utara berbatasan dengan

kabupaten Toba Samosir, di sebelah Timur berbatasan dengan kabupaten Labuhan Batu, di sebelah Selatan dengan kabupaten Tapanuli Selatan dan di sebelah Barat berbatasan dengan kabupaten Humbang Hasundutan dan Tapanuli Tengah.

Kabupaten Tapanuli Utara secara wilayah administrasi terdiri dari 15 kecamatan. Kelimabelas kecamatan ini terbagi dalam 214 desa dan 11 kelurahan. Kecamatan yang paling banyak jumlah desa/kelurahan yaitu kecamatan Tarutung (23 desa dan 7 kelurahan) dan yang paling sedikit jumlahnya yaitu kecamatan Simangumban (7 desa).

Jumlah penduduk kabupaten Tapanuli Utara tahun 2004 sebesar 260.471 jiwa yang terdiri dari 129.351 laki-laki dan 131.120 perempuan. Banyaknya rumah tangga tahun 2004 sebesar 55.621, dengan rata-rata anggota rumah tangga sebesar 4,68 orang.

Jumlah penduduk berdasarkan agama tahun 2004 adalah Protestan sebanyak 234.969 orang (90,18 %), Islam sebanyak 13.614 orang (5,25 %), Katolik sebanyak 11.702 orang (4,50 %), Budha sebanyak 121 orang, Hindu sebanyak 13 orang, dan agama lainnya sebanyak 52 orang. Jumlah rumah ibadah di Tapanuli Utara pada 2004 adalah

739 gereja Protestan, 73 gereja Katolik, 60 masjid, dan 16 langgar.

Jumlah lembaga pendidikan di kabupaten Tapanuli Utara tahun 2004/2005 adalah 395 SD, 3 MI, 57 SMP, 2 MTs, 22 SMA, 1 MA, dan 13 SMK. Jumlah murid dari setiap jenjang 2004/2005 adalah SD 46.677 siswa, MI 277 siswa, SMP 21.074 siswa, MTs 222 siswa, SMA 11.547 siswa, MA 143 siswa, dan SMK 4.367 siswa. Jumlah guru dari setiap jenjang sekolah 2004/2005 adalah SD 2431 guru, MI 21 guru, SMP 1048 guru, MTs 23 guru, SMA 605 guru, MA 11 guru, dan SMK 337 guru.

III. Pendidikan Keagamaan Madrasah Diniyah: MD Al-Falah, MD Al- Munawar, dan MD Nurul Ihsan

Pendidikan keagamaan Islam sebagaimana tercantum dalam UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003 yaitu Diniyah dan Pesantren. Berdasarkan data dari Bidang pekapontren dan Penamas kanwil Sumatra Utara, jumlah pesantren di propinsi Sumatera Utara berjumlah 211 buah dan jumlah MD sebanyak 1669 buah. Khusus

di kabupaten Tapanuli Utara, terdapat satu (1) pesantren dan 3 (tiga) madrasah diniyah. Namun, setelah penulis ke lapangan ternyata 1 buah pesantren tersebut tidak lagi termasuk wilayah Tapanuli Utara karena ada pemekaran wilayah kabupaten Tapanuli Utara menjadi Humbang Hasundutan. Jadi pesantren tersebut berada di kabupaten Humbang Hasundutan. Dibanding pesantren dan Diniyyah, di Tapanuli Utara Majelis Taklim merupakan lembaga pendidikan masyarakat muslim yang relatif eksis. Di Tapanuli Utara terdapat 21 majlis taklim dengan 813 jamaah dan 60 tenaga pengajar.

Jumlah MD di kabupaten Tapanuli Utara yang tercatat di kantor Depag sebanyak 3 buah. Tetapi, sebenarnya ada MD yang tersebar di wilayah yang jauh dari kota kecamatan. Misalnya sebagaimana yang diungkapkan salah satu muslim yang sempat berbincang-bincang dengan penulis saat berada di MD Al-Munawar. Menurutnya, di desa yang sekarang ia tinggal termasuk muslimnya cukup banyak. Dan di desanya itu terdapat satu MD tetapi tidak terdaftar di kandepag. Sebenarnya ia menyarankan penulis untuk mengunjungi desa tersebut tetapi karena alasan jarak yang jauh yaitu dari kota kecamatan Pahae Jae

(Selura) tidak mungkin untuk dijangkau oleh kendaraan. Berikut ini profil ketiga madrasah diniyah yang berada di kabupaten Tapanuli Utara yang masing-masing MD al-Falah di kecamatan Tarutung, MD al-Munawar di kecamatan Pahae Jae, dan MD Nurul Iman di kecamatan Siborong-borong.

a. Madrasah Diniyah Al-Falah

Madrasah ini terletak di Jl. Sutan Amir Hamzah Tobing atau Jl. Pembangunan No. 5 Tarutung. Madrasah ini berada di bawah Yayasan Pendidikan al-Falah yang didirikan oleh para tokoh muslim Tarutung tahun 1962. Para pendiri itu adalah Sidiq Hasibuan, Paninduan Pasaribu, H. Abidin Tambubolon, dan Togap Hutabarat, SH. Mereka semua sudah almarhum. Salah satu pendiri yang masih ada adalah H. Mahmudin Panggaribuan. Ketua yayasan saat ini adalah Anwar Hutabarat. Sebenarnya yayasan ini berada di bawah sebuah perkumpulan yang bernama Persatuan Kaum Muslim (PKM) Tarutung yang berdiri pada tahun 1962. H. Mahmudin Panggaribuan dipercaya oleh kaum muslim di kecamatan Tarutung sebagai ketua Persatuan Kaum Muslim (PKM) Tarutung.

Secara resmi gedung MD ini beroperasi tahun 1984. Sebelum ada bangunan MD yang ditempati sekarang ini, pelaksanaan pendidikan agama Islam dilaksanakan di masjid raya Tarutung yang sejak tahun 1920 sudah berdiri. Tanah yang digunakan untuk bangunan MD adalah wakaf dari mertua H. Mahmudin Panggaribuan.

Jumlah siswa MD ini tahun 2006 sebanyak 92 orang yang terdiri dari kelas I 27 orang, kelas II 27 orang, kelas III 22 orang, dan kelas IV 16 orang. Kepala MD ini bernama Dameria Lumbantobing, S.Pdi. Ia dibantu oleh 4 orang tenaga guru yaitu; Suryati, S.Pdi, Mas-kuriyah Panggabean, S.Pd, Hadi Syamharis, S.Ag, dan Abdul Kadir Siregar. Dilihat dari pendidikan terakhir, hanya Abdul Kadir Siregar yang alumni MA. Sedangkan guru yang pernah mengikuti Diklat adalah Suryati, S.Pdi. dan Hadi Syamharis, S.Ag. Mereka adalah Pegawai Negeri Sipil kecuali Abdul Kadir Siregar yang masih honor. Di MD ini tidak ada tenaga administrasi baik TU, pustakawan, keuangan, dan pesuruh. Guru yang ada dimaksimalkan untuk mengisi peran salah satu tenaga administrasi. Kurikulum yang dipergunakan di MD ini adalah kurikulum Depag.

Tanah yang dimiliki yayasan ini seluas 511 meter persegi. Tanah itu dipergunakan untuk ruang kelas yang berjumlah 8 buah termasuk kantor dan mushola dengan ukuran rata-rata 6 x 4 meter. MD ini memiliki halaman yang cukup luas untuk bermain.

Proses belajar mengajar dilaksanakan pada siang hari. Dimulai pada jam 15.00-15.35 sebagai jam pelajaran pertama. Selanjutnya jam kedua dimulai dari 15.35-16.10. Jam berikutnya adalah 16.10-16.40. Proses belajar mengajar diistirahatkan selama satu jam dari 16.40-17.40. Pelajaran dilanjutkan pada 17.40-18.15.

b. Madrasah Diniyah Al-Munawar

MD ini berada di jalan SM Raya No. 53 kelurahan Sarulla kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara. Letak MD ini persisnya di lingkungan pasar Sarulla. Nama Sarulla adalah ibu kota kecamatan Pahae Jae. Pasar ini adalah pasar milik kecamatan karena posisinya memang berada di pusat kota kecamatan. Dan yang lebih strategis lagi pasar Sarulla ini berada di jalur lintas barat Sumatra. Di sekitar pasar Sarulla terdapat masjid al-Munawar

yang dibangun tahun 1981. Masjid yang berukuran 12mx12m ini dipergunakan untuk melaksanakan sholat Jum'at. Untuk ukuran masyarakat mayoritas muslim, memang masjid ini terbilang sangat kecil bagi pelaksanaan sholat Jum'at, tetapi masjid ini sangat berarti bagi masyarakat muslim Sarulla yang secara jumlah penganut agama termasuk minoritas. Masjid ini merupakan tempat berkomunikasi dan bersosialisasi komunitas muslim yang tersebar di sekitar pasar Sarulla. Di masjid ini pula dilaksanakan penyelenggaraan pendidikan agama Islam bagi masyarakat muslim Sarulla, termasuk pendidikan agama bagi anak-anak. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa masjid ini sebagai pusat seluruh kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat muslim Sarulla. Dan, melalui masjid ini pula inisiatif untuk mendirikan MD al-Munawar muncul.

MD ini didirikan tahun 1991 dilatarbelakangi oleh kesadaran akan Islam dan keinginan masyarakat muslim terhadap tempat pendidikan agama Islam. Di samping itu ada faktor eksteren berupa lingkungan masyarakat yang mayoritas Kristen. Keinginan masyarakat muslim setempat terhadap tempat pendidikan agama Islam yang ter-

pisah dari masjid bertujuan agar penyelenggaraan pendidikan agama Islam bisa maksimal sehingga dapat terlihat syiar Islam dan menciptakan generasi muslim.

Jumlah siswa MD ini adalah 84 orang terdiri dari kelas I 37 orang, kelas II 24 orang, kelas III 11 orang, dan kelas IV 12 orang. Kewajiban SPP siswa sebesar Rp 1000, tetapi untuk siswa yang tidak mampu tidak dipungut. Dari jumlah siswa tersebut yang aktif membayar SPP hanya 20 %. Kepala MD ini adalah Ali Rusman Nasution yang pendidikan terakhirnya S1. Ada tiga tenaga guru di MD ini yaitu, Hasanuddin Batubara (alumni MA), Suyanto Sianturi (alumni SMA), dan Abd Tolib Siregar, sarjana pendidikan Islam. Para guru tersebut diberi honor sebagian besar dari para donatur dan bantuan masyarakat karena SPP siswa hanya masuk 20 %. Niat ikhlas sudah tertanam kuat di dalam dada mereka. Menurut salah seorang guru MD, Hasanudin Batubara, bahwa ada beberapa hal yang mendorong semangat dirinya untuk mengabdikan di MD ini, yaitu 1) adanya kasus pemurtadan di kalangan muslim, 2) menanamkan ajaran Islam, 3) persatuan dan kesatuan muslim, 4) panggilan Tuhan, dan 5) perlu adanya generasi muslim.

Jenis-jenis perangkat kurikulum seperti struktur program, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, buku pendukung, media pembelajaran, alat peraga, dan evaluasi tidak ada di MD ini. Memang dari hasil pengamatan kami, jenis-jenis perangkat kurikulum tersebut merupakan hal yang ideal. Jenis-jenis perangkat kurikulum yang tersedia adalah 1 buku panduan, 1 kalender akademik, dan 1 jadwal pelajaran. Karena hanya ada tiga ruang kelas belajar maka ada satu ruang dipergunakan untuk dua kelas.

Struktur organisasi MD ini memang ada tetapi terlihat sangat sederhana. Tidak ada *job description* dan uraian tugas. Para personel yang berjumlah 4 orang melaksanakan tugasnya secara sederhana. Walaupun mempergunakan manajemen yang sederhana, pihak madrasah melibatkan seluruh unsur komunitas madrasah dalam pengambilan keputusan. Karena keterbatasan personel yang aktif maka pembatasan antara guru, orang tua siswa, dan masyarakat sangat tipis perbedaannya. Misalnya seorang guru, ia juga berperan aktif sebagai orang tua siswa dan sekaligus sebagai masyarakat pendukung setia MD. Sebuah keputusan lahir tidak saja atas asas

musyawarah melainkan juga atas dasar “seiman” atau “keyakinan yang sama”.

c. Madrasah Diniyah Nurul Iman

MD ini terletak di pinggir jalan lintas Sumatra tepatnya di Jl. SM Raja No 1 kecamatan Siborong-borong. Awalnya adalah pengajian di masjid Taqwa yang memang sudah lebih dulu dibangun tahun 1959. Bangunan masjid ini dibangun atas partisipasi dan dukungan dari masyarakat muslim di sekitar pasar Siborong-borong. Jumlah KK yang menganut agama Islam di kelurahan Siborong-borong sebanyak kurang lebih 80 KK. Masjid ini adalah salah satu dari dua masjid yang ada kecamatan Siborong-borong. Letak masjid yang strategis mendorong para tamu khususnya para pengendara mobil baik dari arah Medan-Tarutung maupun dari arah Tarutung-Medan menyempatkan diri untuk berhenti di masjid ini. Tujuan mereka beragam baik untuk melaksanakan sholat atau hanya sekedar untuk beristirahat.

Di lingkungan masjid terdapat bangunan RA dan MD. Sebelum bangunan RA dan MD itu terpisah

dari bangunan masjid, pengajian anak-anak diselenggarakan di salah satu ruang dalam masjid. Kegiatan penyelenggaraan pengajian anak-anak itu sudah ada sejak tahun 1975. Seperti membangun masjid, gedung MD dilakukan melalui swadaya masyarakat dengan cara menyebarkan kotak infaq di setiap rumah yang beragama Islam, termasuk rumah makan. Tujuan didirikan MD Nurul Iman untuk menciptakan kader muslim di daerah minoritas dan perjuangan dakwah.

MD ini memiliki jumlah siswa sebanyak 64 orang, terdiri dari kelas I (18 orang), kelas II (22 orang), dan kelas III (24 orang). Di MD ini terdapat dua orang guru yang sekaligus merangkap sebagai pembina dan dai. Mereka adalah Arisbat Sinulingga dan Dhani Anshori Harahap. Pendidikan Arisbat adalah S1 (sarjana pendidikan Islam) IAIN Medan. Dan, Dhani Anshori adalah S1 (sarjana hukum Islam). Selain mereka berdua sebagai guru, di MD ini terdapat tenaga administrasi satu orang yang mengurus keuangan. Sebagai guru, mereka mendapat honor dari masyarakat melalui pengurus masjid sebesar Rp 600.000 per bulan. Sebenarnya selain honor resmi dari pihak pengelola mereka dapat juga

dari hasil mengajar mereka di berbagai tempat di daerah Siborong-borong. Tidak mudah untuk mencari tenaga pengajar MD. Salah seorang pengurus, Napitupulu, menceritakan sudah berkali-kali keluar masuk tenaga pengajar di MD. Umumnya ustadz yang keluar disebabkan oleh 1) di kalangan ustadz tidak ada semangat, 2) jiwa dakwah tidak ada, dan 3) faktor daerah Taput sendiri yang biasanya ditakuti orang karena pusat agama Kristen Protestan. Jika seorang ustadz yang mau keluar dari MD Nurul Iman karena alasan diangkat jadi PNS atau berkeluarga maka ia diminta untuk mencarikan orang sebagai pengganti.

Berkaitan dengan kurikulum, jenis perangkat kurikulum seperti struktur program, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, buku pendukung, dan media pembelajaran ada di MD Nurul Iman. Tetapi, jenis-jenis perangkat lain seperti kalender akademik, alat peraga, dan evaluasi baik bank soal maupun remedial tidak ada di MD ini. Dilihat dari segi manajemen, tidak ada struktur organisasi, *job description* dan uraian tugas yang jelas. Walaupun begitu dalam pengambilan keputusan, selalu melibatkan guru, orang tua siswa, dan penerapan asas musyawarah.

Target yang hendak dicapai dari penyelenggaraan MD Nurul Iman agar alumninya dapat membaca al-Qur'an yang sesuai dengan *makbarijul huruf*, melaksanakan sholat, berdoa, membentuk akhlak yang baik, menanamkan sejak awal tentang makanan-makanan yang halal dan haram, serta toleransi beragama.

IV. Jenis Pendidikan keagamaan

Umumnya jenis pendidikan keagamaan yang diselenggarakan oleh para pengelola di tiga MD tersebut adalah membaca al-Qur'an, menulis al-Qur'an, dan belajar sholat. Baik di MD al-Falah, al-Munawar, dan Nurul Iman, materi-materinya merupakan pelajaran wajib yang harus dilalui oleh para murid. Setelah itu, sebagai pelajaran lanjutan, murid diberikan pelajaran fikih dan tauhid. Di MD al-Munawar dan Nurul Iman diajarkan juga pelajaran tarikh nabi Muhammad atau SKI. Khusus di MD Nurul Iman diajarkan bahasa Arab dan aksara Arab Melayu.

Jenis-jenis pendidikan keagamaan tersebut sebagaimana di daerah-daerah yang mayoritas muslim juga diajarkan. Alasan yang

dikemukakan oleh para penyelenggara di ketiga MD tersebut tidak jauh berbeda dengan alasan yang dikemukakan oleh para penyelenggara MD di daerah-daerah mayoritas muslim. Membaca al-Qur'an, menulis al-Qur'an dan belajar sholat adalah materi pelajaran yang wajib diberikan kepada setiap anak muslim. Karena menjadi dasar bagi si anak dalam mengembangkan pendidikan keagamaan untuk jenjang selanjutnya. Dan jenis pendidikan tersebut bersifat aflikatif untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terkait dengan salah satu rukun Islam yang kedua yaitu sholat. Ketika seorang muslim melaksanakan sholat lima kali dalam sehari maka orang muslim yang bersangkutan dituntut mampu melaksanakan sholat lima kali sehari itu dengan baik dan benar. Dalam sholat ada ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang harus dikerjakan oleh setiap orang yang melaksanakan sholat. Ucapan-ucapan itu ada yang berasal dari al-Qur'an seperti membaca surat al-Fatihah yang menjadi salah satu rukun shalat atau membaca salah satu ayat-ayat al-Qur'an. Ditambah lagi serangkaian bacaan-bacaan shalat lainnya yang tentu saja menggunakan huruf dan

bahasa arab. Begitu juga perbuatan-perbuatan shalat seperti *takbiratul ibram, ruku, i'tidal, sujud, tahiyat*, dan lain-lain juga perlu ada pembelajaran.

V. Harapan Masyarakat

Harapan adalah ambisi dan keinginan untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dari pada apa yang dimiliki saat ini, atau keinginan untuk meraih cita-cita. Keinginan yang kuat dapat mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal yang kurang diminatnya, semata-mata demi terwujudnya hal-hal yang diinginkannya. Setiap orang memiliki tingkat keinginan sendiri, yaitu tingkat yang diinginkan dapat tercapai. Biasanya, tingkat harapan yang realistis adalah yang sepadan dengan kemampuan sendiri dan keadaan seperti ini memberikan peluang yang lebih besar untuk tercapainya hal-hal yang diinginkan. Jika seseorang mempunyai tingkat harapan yang jauh di atas kemampuannya, besar kemungkinan bahwa ia akan gagal dan mengalami frustrasi. Seseorang yang kurang berani menghadapi kegagalan cenderung

untuk mempunyai tingkat harapan yang rendah.⁶

Setidaknya kerangka definisi di atas dapat digunakan dalam menggambarkan harapan masyarakat muslim minoritas di kecamatan Tarutung, Pahae Jae, dan siborong-borong terhadap pendidikan keagamaan. Dari beberapa informan yang anaknya belajar di tiga MD yang kami wawancarai, terlihat ada keinginan dan harapan terhadap lembaga MD. Dra Rosintan Butar-Butar yang anaknya belajar di kelas II MD al-Falah menginginkan jenis pendidikan agama yang lebih tinggi. Alumni S1 IAIN yang bekerja sebagai hakim agama membandingkan anaknya waktu belajar di MD di luar Tarutung. Menurut isteri Aminudin Nurzam ini, seorang guru PNS di MTS, bahwa materi pelajaran di MD al-Falah tergolong dasar jika dibandingkan waktu ia tinggal di Pematang Siantar, namun karena hanya ada satu-satunya MD di tempat tinggalnya ia terpaksa memasukkan anaknya ke MD al-Falah. Yang penting baginya, setelah keluar dari MD anaknya berharap selamat dunia akhirat. Begitu juga dengan Poltak Sihombing, seorang PNS di

⁶ Dikutip dari Ensiklopedi Nasional Indonesia, jilid 2, PT Cipta Adi Pustaka, Jakarta 1988, hal. 373.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tapanuli Utara yang anaknya belajar di MD al-Falah. Ia menginginkan ada jenjang pendidikan MD yang lebih tinggi. Tetapi, Jenis pendidikan yang diinginkannya adalah pelajaran dasar-dasar keagamaan untuk menanamkan akhlak yang baik. Ia berharap segala fasilitas pembelajaran ditingkatkan agar anak didik betah belajar dan bertambah banyak siswa yang masuk. Kelengkapan fasilitas MD diinginkan juga oleh Abdurahman Panggabean, seorang guru PNS di bidang agama. Walaupun MD fasilitasnya belum memadai sesuai ukuran di masyarakat muslim mayoritas, menurut pemilik rumah makan ini MD al-Falah cukup memadai segala fasilitasnya untuk ukuran masyarakat minoritas. Harapan terhadap jenis pendidikan yang diselenggarakan di MD ini adalah pendidikan yang bersifat ketauhidan.

Harapan para orang tua murid MD al-Falah terhadap lembaga anaknya tidak jauh berbeda dengan harapan para orang tua murid MD al-Munawar terhadap lembaga MD al-Munawar. M. Roy Siregar, pemilik rumah makan dan toko, menginginkan lembaga pesantren selain MD. Oleh karena itu selain membaca al-Quran dan pelajaran sholat, ia

juga menginginkan ada pelajaran bahasa Arab. Menurutny, anaknya dimasukkan ke MD al-Munawar ini agar anaknya beriman dan berguna bagi masyarakat dan bangsa. Sama seperti orang tua lainnya, ia juga menginginkan fasilitas MD yang lengkap untuk kemajuan agama Islam di daerahnya. Hasarudin seorang alumni pesantren yang berprofesi sebagai tukang ojeg dan sekaligus guru MD al-Munawar menganggap penting pelajaran bahasa arab ini. Keinginan terhadap lengkapnya fasilitas MD al-Munawar juga dikatakan oleh Suyanto Sianturi seorang wiraswasta dan guru MD al-Munawar. Bahkan, Safiah seorang ibu yang paruh baya berucap dengan semangat "lembaga pendidikan ini terkait dengan kondisi umat Islam di sini yang minoritas. Oleh karena itu Islam supaya maju di pasar Sarulla."

Sementara itu harapan penyelenggara dan para orang tua murid terhadap MD Nurul Iman Siborongborong adalah jenjang pendidikan keagamaan yang lebih tinggi. Bentuk lembaga pendidikan keagamaan yang diinginkan cukup TPA dan MD dengan jenis pendidikan membaca al-Quran, pengajian, belajar shalat, dan bahasa Arab. Kelengkapan fasilitas merupakan harapan masya-

rakat. A. Fahmi Lubis, salah seorang wali murid, menginginkan kelengkapan fasilitas. Menurutnya hal ini bertujuan supaya anak bertambah semangat dan dapat menambah ilmu. Ia berharap agar disediakan guru pendidikan agama.

VI. Analisis

Sebelum mendeskripsikan pelayanan pendidikan keagamaan di wilayah Tarutung, Pahae Jae, dan Siborong-borong, penulis secara selintas akan menggambarkan terlebih dahulu perkumpulan-perkumpulan kaum muslim yang memberikan peran besar bagi perkembangan kegiatan sosial keagamaan umat Islam dan pendidikan Islam di kecamatan Tarutung khususnya dan di Tapanuli Utara umumnya.

a. Persatuan Kaum Muslim (PKM) Tarutung

Perkembangan kegiatan sosial keagamaan dan pendidikan Islam di kecamatan Tarutung tidak bisa dilepaskan dari peran organisasi Persatuan Kaum Muslim (PKM) Tarutung. Organisasi ini merupakan

pilar kegiatan-kegiatan keagamaan Islam di Tarutung. Organisasi ini berdiri pada 1962. Pendirian organisasi ini dilatarbelakangi oleh kesulitan putra daerah Tarutung yang beragama Islam khususnya dan umat Islam dari luar Tarutung umumnya dalam mengamalkan ajaran Islam. Kesulitan yang paling terlihat adalah saat ada seorang muslim yang tinggal di suatu desa di mana hanya dia sendiri yang beragama Islam, maka kewajiban seorang muslim kepada seorang muslim yang lain tidak terlaksana secara maksimal. Disamping itu terdapat faktor eksternal yang melatarbelakangi pendirian PKM yaitu kondisi Tarutung sebagai pusat agama Kristen Protestan di Indonesia. Bagi Mahmudin Panggabean, ketua PKM, dengan adanya organisasi ini, umat Islam di Tarutung dapat mengenal Islam dengan baik dan sekaligus dapat mengamalkannya. Menurutnya, "sudah cukup bagus kalau orang Islam di Tarutung tidak murtad."⁷ Para anggota PKM ini adalah seluruh umat Islam yang ada di kecamatan Tarutung baik umat Islam asli Tarutung sendiri maupun dari luar Tarutung seperti dari umat Islam dari Tapanuli Selatan, Padang,

⁷Wawancara dengan Mahmudin Panggabean (ketua PKM) di Tarutung tanggal 23 Mei

Jawa dan lainnya. Mereka berasal dari berbagai lapisan dan kelompok masyarakat muslim di Tarutung.⁸

Perkembangan PKM selanjutnya ditandai dengan semakin banyaknya kaum muslim dari luar yang datang ke Tarutung, di antaranya kaum muslim dari Tapanuli Selatan, Padang, dan Jawa. Mereka membuat perkumpulan-perkumpulan berdasarkan asal mereka. Dan mereka menyelenggarakan pengajian majlis taklim-majlis taklim. Misalnya, orang Jawa mendirikan perkumpulan Tunggal Wargo dan nama majlis taklimnya adalah Al-Muhajirin Tunggal Wargo untuk kaum laki-laki dan Tunggal Wargo ibu untuk kaum perempuan. Orang Tapanuli Selatan mendirikan perkumpulan umat Islam Tapanuli Selatan dan nama majlis taklimnya adalah kaum bapak Tapsel untuk laki-laki dan kaum Ibu Tapsel untuk perempuan. Untuk muslim dari Padang, ada Perkumpulan Perantaraan Minang (PPM). Seiring dengan diselenggarakannya majlis taklim berdasarkan dari mana mereka berasal, kaum pribumi muslim

Tarutung juga mendirikan majlis taklim yang bernama Bona Pasogit.⁹ Sampai saat penelitian dilakukan jumlah Majlis Taklim di kecamatan Tarutung sebanyak 10 buah dengan 441 jamaah dan 33 tenaga pegajar, di kecamatan Pahae Jae sebanyak 2 buah dengan 75 jamaah dan 6 tenaga pengajar serta di kecamatan Siborong-borong sebanyak 3 buah dengan 130 jamaah dan 5 tenaga pengajar.¹⁰

Kegiatan organisasi PKM bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan. Dalam pelaksanaan kegiatannya, PKM berupaya untuk melakukan kerjasama dengan Pemda Tapanuli Utara yang secara politis dikuasai oleh mayoritas Kristen. Pihaknya berusaha untuk menempatkan orang Islam di pemerintahan. Salah satu hasilnya adalah adanya orang-orang Islam Tarutung yang berada di pemerintahan. Dengan adanya orang Islam di pemerintahan PKM dapat bekerjasama dengan pihak pemda misalnya dalam kegiatan perayaan hari besar Islam.

⁸ Wawancara dengan Amir Panggabean (pengawas pendidikan Agama Islam Kandepag Tapanuli Utara dan pendiri pengurus PKM) di Tarutung tanggal 23, 24 Mei 2006

⁹ Ibid.

¹⁰ Data diambil dari Kantor Departemen Agama kabupaten Tapanuli Utara

Kemunculan organisasi PKM dan perkumpulan umat Islam lainnya di Tarutung telah menyemarakkan kegiatan keagamaan Islam di Tarutung. Setiap muslim di Tarutung terdaftar sebagai anggota PKM, dan bagi muslim dari luar Tarutung disamping sebagai anggota PKM juga anggota perkumpulan Tunggal Wargo, Persatuan Perantau Minang (PPM), dan Perkumpulan Umat Islam Tapanuli Selatan. Mereka berasal dari berbagai lapisan dan kelompok masyarakat muslim di Tarutung. Salah seorang staf di Kasi yang membidangi masalah keislaman termasuk pendidikan menceritakan kepada penulis bahwa hampir seluruh umat Islam di Tarutung adalah anggota PKM. Lebih lanjut ia memaparkan dari mulai masyarakat biasa sampai para pejabat dan para staf yang muslim di Depag Kabupaten Tapanuli Utara, para pemilik rumah makan dan hotel milik muslim, termasuk anggota PKM.

b. Pelayanan Pendidikan Keagamaan di Kalangan Masyarakat Minoritas

Kata kasar dari BPS kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2004 menyebutkan jumlah penduduk yang beragama Islam di kabupaten ini

masing-masing kecamatan adalah: Parmonangan 66 jiwa, Adiankoting 179 jiwa, Sipoholon 151 jiwa, Tarutung 2.183 jiwa, Siatas Barita 1.328 jiwa, Pahae Julu 557 jiwa, Pahae Jae 2.370 jiwa, Purba Tua 884 jiwa, Simangumban 2.831 jiwa, Pangaribuan 1.012 jiwa, Garoga 1.011 jiwa, Sipahutar 132 jiwa, Siborong-borong 619 jiwa, Pagaran 50 jiwa, dan Muara 241 jiwa. Jika data kasar itu dibandingkan dengan jumlah keberadaan tempat ibadah, tempat pengajian (majlis taklim), lembaga pendidikan formal seperti sistem madrasah, dan madrasah diniyah terlihat ketidakmerataan antara jumlah umat Islam di satu kecamatan dan satu kecamatan yang lain dengan keberadaan institusi keagamaan tersebut. Walaupun masih hipotesa, berikut penulis gambarkan bagaimana masyarakat muslim minoritas di kabupaten Tapanuli Utara dalam mendapat pelayanan keagamaan termasuk pelayanan pendidikan.

Pertama, ada umat Islam di kecamatan yang bersangkutan yang sama sekali tidak terdapat masjid, majlis taklim, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, madrasah aliyah dan madrasah diniyah, yakni kecamatan Parmonangan, Sipoholon, Pagaran dan Muara. Artinya

umat Islam yang berjumlah 508 jiwa di empat kecamatan tersebut diduga tidak menjalankan ibadah sholat di tempat ibadahnya, walaupun meeka mungkin melakukannya di rumah masing-masing. Jangankan untuk mendapatkan pelayanan pendidikan keagamaan untuk melaksanakan kewajiban mereka sebagai muslim yakni sholat di masjid pun tidak terlayani.

Kedua, umat Islam di kecamatan yang bersangkutan hanya mendapat pelayanan keagamaan dari satu institusi yakni tempat ibadah (masjid). Masjid bagi mereka adalah satu-satunya tempat untuk berkumpul diantara sesama muslim. kecamatan yang hanya ada tempat ibadah adalah kecamatan Adiankoting.

Ketiga, umat Islam yang mendapat pelayanan baik pelayanan berbentuk keagamaan dari masjid, langgar maupun pelayanan pendidikan keagamaan dari majlis taklim, madrasah formal, dan madrasah diniyah. kecamatan-kecamatan yang terdapat institusi-institusi keagamaan tersebut adalah: Tarutung, Siatas Barita, Pahae Julu, Pahae Jae, Purba Tua, Simangumban, Pangaribuan, Garoga, Sipahutar, dan Siborong-borong. Mereka umat Islam yang berada di kecamatan-kecamatan tersebut

mendapatkan pelayanan baik keagamaan maupun pendidikan keagamaan relatif cukup. Bakan umat Islam di tiga kecamatan tersebut yakni Tarutung, Pahae Jae, dan Siborong-borong terlihat semarak dalam aktivitas keagamaannya. Minoritas muslim di tiga kecamatan tersebut mendapat pelayanan baik dari masjid, majlis taklim maupun madrasah diniyah.

Di kecamatan Tarutung terdapat 7 masjid, 1 langgar, 1 MD, dan 10 majlis taklim dengan 441 jamaah dan 33 tenaga pegajar. Di kecamatan Pahae Jae terdapat 6 masjid, 5 langgar, 1 MD, dan 2 Majlis Taklim dengan 75 jamaah dan 6 tenaga pengajar. Sedangkan di kecamatan Siborong-borong terdapat 1 masjid, 1 langgar, 1 MD, dan 3 Majlis Taklim dengan 130 jamaah dan 5 tenaga pengajar.

Dari data-data tersebut penulis mencoba menguji hipotesa yang mengatakan bahwa ada dugaan kuat bahwa pada masyarakat minoritas akan terjadi kurangnya pelayanan terutama pelayanan pendidikan keagamaan. Sebagaimana telah disebutkan bahwa fokus penelitian ini adalah pendidikan keagamaan berupa pesantren dan madrasah diniyah maka yang akan dianalisa adalah kedua bentuk keagamaan

tersebut. Karena di Tapanuli Utara tidak terdapat pesantren maka pendidikan keagamaan madrasah diniyah akan dijadikan fokus dalam penelitian ini.

Pelayanan pendidikan pada hakekatnya merupakan sebuah pekerjaan, yaitu pekerjaan yang dilakukan untuk orang lain. Pelayanan mengacu pada bantuan atau dukungan yang diberikan untuk menghasilkan produk atau perilaku penyedia layanan yang dalam hal ini pengelola pendidikan madrasah diniyah yang berkaitan dengan sikap melayani seperti memberi saran atau informasi. Dengan demikian, pelayanan pendidikan keagamaan merupakan perbantuan bagi pelanggan dalam hal ini masyarakat minoritas muslim di Tapanuli Utara.

Baik buruknya pelayanan dapat dilihat dari indikator sebagai berikut: 1) lembaga MD harus memiliki keandalan, yaitu kemampuan tenaga kependidikan MD untuk memberikan jasa sesuai yang dijanjikan. 2) lembaga MD harus memiliki daya tanggap yaitu kemampuan tenaga administrasi dan atau karyawan untuk membantu masyarakat pengguna lembaga MD secara cepat dan bermakna. 3) memiliki kepastian yaitu tenaga administrasi dan karya-

wan memiliki kemampuan untuk meyakinkan bahwa janji yang disampaikan adalah benar akan terpenuhi. 4) secara kelembagaan MD memiliki rasa empati yaitu semua unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan MD peduli atau bisa memberikan perhatian secara individual kepada pengguna lembaga. 5) fasilitas-fasilitas kependidikan MD bisa dilihat mulai dari fasilitas fisik, peralatan dan perlengkapan komunikasinya.

Lembaga MD merupakan gabungan antara penyedia jasa dan pelanggan. Karena lahirnya MD berasal dari umat, untuk umat, dan oleh umat. Kepala, guru, staf administrasi adalah kumpulan pelayanan, sedangkan orang tua murid, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat pada umumnya adalah kumpulan pelanggan. Jika kita melihat fenomena lahirnya MD, sulit dipisahkan satu sama lain karena misalnya seorang kepala MD, guru MD disamping sebagai penyedia layanan, mereka juga pengguna jasa tersebut dengan anaknya belajar di MD bersangkutan. Meskipun tidak mudah untuk membedakan siapa penyedia layanan dan siapa pengguna jasa dalam kasus pelayanan pendidikan MD, indikator-indikator baik buruk-

nya sebuah pelayanan sebagaimana telah disebutkan dapat menjadi alat analisa.

Pertama, dikatakan baik pelayanan pendidikan MD jika memiliki keandalan, yaitu kemampuan tenaga kependidikan MD untuk memberikan jasa sesuai yang dijanjikan. Profil tenaga guru di tiga MD tersebut berjumlah 9 orang yang masing-masing MD al-Falah Tarutung (4 orang), MD al-Munawar Pahae Jae (3 orang), dan MD Nurul Iman Siborong-borong (2 orang). Dilihat dari latar belakang pendidikan mereka terbilang *qualified* karena berpendidikan S1, kecuali Abdul Kadir Siregar dari MD al-Falah, dan tiga guru MD al-Munawar Pahae Jae yakni Hasanudin, Suyanto Sianturi, Abd Tolib Siregar yang semuanya lulusan SLTA. Bahkan di MD al-Falah dua guru alumni perguruan tinggi jurusan pendidikan yakni Suryati dan Maskuriyah.

Seberapa besar ketercukupan dan keandalan tenaga guru tersebut di MD masing-masing dalam melayani pendidikan anak didiknya. Rosintan Butar-Butar menilai keadaan guru MD al-Falah kurang akibatnya pelayanan pendidikan tidak terpenuhi apalagi kalau ada guru kelas. Seharusnya ada semacam spesialisasi guru, misalnya, ada

guru pelajaran nahu dan sharaf. Poltak Sihombing mengusulkan penambahan guru tetap karena sebagian besar guru MD al-Falah adalah PNS kegiatannya banyak di tempat ia mengajar pada pagi hari. Walaupun begitu, kata Sihombing, tenaga guru yang ada *sudah bisa* (baik) melayani pendidikan keagamaan.

Bagaimana ketercukupan dan keandalan tenaga guru di MD al-Munawar. M. Roy Siregar menilai keadaan guru belum cukup tetapi tenaga pendidik sudah bisa melayani pendidikan. Keadaan guru di MD al-Munawar juga dikatakan. Safiah belum cukup, dan belum bisa melayani pendidikan. Begitu juga dengan Hasaruddin Batubara dan Suyanto Sianturi yang keduanya guru MD al-Munawar menilai bahwa MD al-Munawar masih kurang guru.

Belum cukupnya tenaga guru juga disampaikan para orang tua murid MD Nurul Iman Siborong-borong. Memang di MD Nurul Iman hanya ada dua orang guru padahal kelasnya ada tiga. Menurut para orang tua murid bahwa guru MD Nurul Iman tidak bisa tamatan Madrasah Aliyah. Guru-guru di MD ini harus mampu berkomunikasi dengan masyarakat yang cukup berpendidikan baik dengan

minoritas muslim maupun mayoritas Kristen. Walaupun hanya dua orang guru, pelayanan pendidikan keagamaan sudah baik dari segi kualitas.

Kedua, dikatakan baik pelayanan pendidikan MD jika memiliki daya tanggap, yaitu kemampuan tenaga administrasi dan atau karyawan untuk membantu masyarakat pengguna lembaga MD secara cepat dan bermakna. Di tiga MD tersebut tidak ada peran khusus diposisikan sebagai tenaga administrasi. Di MD al-Falah hanya ada tenaga administrasi berjenis tenaga keamanan, dan di MD Nurul Iman hanya ada tenaga administrasi keuangan. Sedangkan di MD al-Munawar sama sekali tidak ada tenaga administrasi. Individu atau kelompok yang membantu masyarakat pengguna MD adalah seluruh masyarakat muslim sendiri. Mereka saling bertukar pikiran seputar perencanaan, harapan dan target yang hendak dicapai. Selain itu juga mereka bersama-sama meyakinkan bahwa usaha-usaha yang direncanakan itu akan tercapai targetnya. Karenanya sesuai dengan indikator pelayanan yang *ketiga* yakni dikatakan baik pelayanan pendidikan MD jika memiliki kepastian yaitu tenaga administrasi dan karyawan me-

iliki kemampuan untuk meyakinkan bahwa janji yang disampaikan adalah benar akan terpenuhi. Dari indikator kedua dan ketiga pelayanan dapat dikatakan bahwa pelayanan pendidikan MD sudah tergolong baik.

Begitu juga dengan indikator yang *keempat* dapat dikatakan baik pelayanan pendidikan MD, karena semua unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan MD peduli atau bisa memberikan perhatian secara individual kepada pengguna lembaga. Baik di MD al-Falah, al-Munawar maupun Nurul Imam mereka antara penyelenggara MD dan pengguna MD menjadi "satu komunitas muslim" yang berbeda dengan 'komunitas Kristen'.

Indikator *kelima* adalah dikatakan baik pelayanan pendidikan MD jika fasilitas-fasilitas kependidikan MD bisa dilihat mulai dari fasilitas fisik, peralatan dan perlengkapan komunikasinya. Umumnya para orang tua murid mengatakan bahwa untuk daerah minoritas, fasilitas-fasilitas kependidikan MD sudah memadai. Namun, mereka berusaha bersama-sama dengan penyelenggara MD untuk menambah ruang belajar, menambah ruang mushola, melengkapi fasilitas buku

pelajaran dan merenovasi ruang-ruang yang sudah rusak.

VII. Kesimpulan dan Rekomendasi

A. Kesimpulan

Dari analisa di atas ada beberapa kesimpulan penelitian, yaitu:

1. Tempat ibadah umat Islam seperti masjid merupakan pelayanan keagamaan yang pertama dan utama. Di samping sebagai tempat ibadah, masjid sebagai tempat pendidikan bagi masyarakat minoritas dan melalui masjid lahir pemikiran untuk mengembangkan bentuk pendidikan keagamaan yang permanen seperti majlis taklim dan madrasah diniyah.
2. Pendidikan keagamaan yang diprakarsai oleh masyarakat seperti majlis taklim dan madrasah diniyah lebih berkembang dari pada pemerintah. Kasus di Tapanuli Utara memperlihatkan hal itu dimana jumlah majlis taklim lebih banyak ketimbang

madrasah formal seperti MI, MTs, MA, dan MD.

3. Implementasi pelayanan pendidikan keagamaan madrasah diniyah di minoritas muslim Tapanuli Utara hampir seluruhnya atas inisiatif masyarakat muslim. Posisi pemerintah dalam hal ini Kasi yang membidangi urusan keagamaan Islam di Kandepag sebagai fasilitator karena mereka telah menyatu dengan masyarakat muslim lainnya yang diikat dalam sebuah perkumpulan umat Islam.
4. Jenis pelayanan pendidikan keagamaan masih dasar seperti membaca al-quran, belajar sholat, dan pelajaran akhlak. Dan, sebenarnya masyarakat menginginkan untuk mendapatkan jenis pelayanan pendidikan keagamaan yang lebih tinggi.
5. Hambatan masyarakat tentang pendidikan keagamaan di lingkungan masyarakat minoritas terkait dengan kegigihan masyarakat itu sendiri dan politik keagamaan yang

diterapkan oleh penda setempat.

B. Rekomendasi

1. Perlu dibangun masjid di kecamatan yang tidak ada masjid dan penambahan masjid bagi kecamatan yang hanya satu masjid minimal satu desa/kelurahan memiliki satu masjid
2. Karena keterbatasan fungsi masjid saat ini yang hanya sebagai tempat shalat, bagi Depag perlu didirikan MD minimal satu kecamatan satu MD
3. Sesuai dengan harapan masyarakat tertentu yang menginginkan jenis pendidikan keagamaan yang lebih tinggi perlu ada MD tingkat wustha dengan materi pelajaran yang lebih tinggi
4. Karena perkumpulan umat Islam seperti Perkumpulan umat Islam di Tarutung telah terbukti perannya dalam

menyemarakkan aktivitas keagamaan, pihak Kasi yang mengurus keagamaan Islam di Kandepag perlu mensosialisasikan dan mendorong untuk mendirikan perkumpulan yang sama di seluruh kecamatan di Tapanuli Utara.

SUMBER

- Kantor Departemen Agama kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005, *Data Jumlah Masjid dan Majelis Taklim di Kabupaten Tapanuli Utara*.
- Ensiklopedi Nasional Indonesia*, jilid 2, PT Cipta Adi Pustaka, Jakarta 1988
- Kabupaten Tapanuli Utara Dalam Angka Tahun 2004
- Propinsi Sumatra Utara Dalam Angka Tahun 2004
- Transkrip Wawancara dengan Mahmudin Panggabean (ketua PKM) di Tarutung tanggal 23 Mei 2006.
- Transkrip Wawancara dengan Amir Panggabean (pengawas pendidikan Agama Islam Kandepag Tapanuli Utara dan pengurus PKM) di Tarutung tanggal 23, 24 Mei 2006